



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
UNIT KERJA : DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : BETTY SAKURA
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 727245

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.380.000.000

1. Tanah Seluas 451 m2 di KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah Seluas 803 m2 di MUARO JAMBI, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
3. Tanah Seluas 8984 m2 di KOTA MUARA TEBO , WARISAN Rp. 800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 165.000.000

1. MOBIL, TOYOYA AVANZA AVANZA 1.3 E M/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOTOR, YAMAHA B5D A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 9.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 5.918.727

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.559.918.727

III. HUTANG

Rp. 220.103.630

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.339.815.097

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.